

LAMPIRAN

NOMOR 81
TENTANG
EVALUASI

II
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015

PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN

INSTRUMEN PENGUNGKAP DATA DAN NILAI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN

Petunjuk:

1. Instrumen Pengungkap Data dan Nilai Perkembangan Desa dan Kelurahan ini merupakan instrumen yang cukup objektif untuk melihat dan menilai perkembangan Desa dan Kelurahan.
2. Isilah Instrumen Evaluasi ini dengan kejujuran karena akan berdampak pada keabsahan tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan. Dengan demikian maka pembinaan pemerintah dan pemerintah daerah terhadap Desa dan Kelurahan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan. Bagi Desa dan Kelurahan itu sendiri dapat mengevaluasi diri dan melakukan upaya segera untuk meningkatkan perkembangan Desa dan Kelurahannya masing-masing.
3. Lingkarilah poin/angka (Kolom 4 dan Kolom 5) yang besumber dari Bidang, Aspek, Indikator, dan Subindikator secara benar dan tepat pada kondisi dua tahun terakhir.
4. Kondisi/jumlah tahun ke-I (kolom 4) dan tahun ke-II (kolom 5) harus diisi lengkap. Apabila salah satu data tidak diisi lengkap maka data cukup sulit diolah. Sebagai konsekuensinya, Desa dan Kelurahan yang bersangkutan cukup sulit diketahui tingkat perkembangannya.
5. Untuk mengisi instrumen ini secara akurat diperlukan sumber data yang komprehensif dan terdokumentasikan serta informan yang andal.

A. BIDANG PEMERINTAHAN

NO	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET		
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)			
1	2	3	4	5	6		
i. PEMERINTAHAN DESA							
1.	Musyawarah Desa	a. Pelaksanaan Musyawarah Desa			Apabila ada, Kapan Dilaksanakan (Waktu Pelaksanaan: Lampirkan <i>Fotocopy</i> Data Pendukung)		
		TIDAK ADA	1	1			
		ADA	2	2			
		b. Peserta Musyawarah Desa:					
		- Keterwakilan unsur masyarakat					
TIDAK ADA	1	1	Apabila ada, lampirkan <i>fotocopy</i> bukti daftar hadir notulen rapat				
ADA	2	2					
- Keterwakilan unsur Pemerintah Desa							
TIDAK ADA	1	1	Apabila ada, lampirkan <i>fotocopy</i> bukti daftar hadir notulen rapat				
ADA	2	2					
- Keterwakilan Badan Permusyawarahan				Apabila ada,			

		Desa	1	1	lampirkan <i>fotocopy</i> bukti daftar hadir notulen rapat
		TIDAK ADA	2	2	
		ADA			
		- Waktu pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa			
		1) setelah bulan juni tahun berjalan	1	1	
		2) sampai dengan bulan juni tahun berjalan	2	2	
		c. Materi yang dibahas di Musyawarah Desa apa saja:			
		- Penataan Desa			Lampirkan <i>fotocopy</i> dokumen
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		- Perencanaan Pembangunan Desa			Lampirkan <i>fotocopy</i> dokumen
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		- Peraturan Desa tentang RPJMDesa			Lampirkan <i>fotocopy</i> dokumen
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		- Peraturan Desa tentang RKPDesa			Lampirkan <i>fotocopy</i> dokumen
		TIDAK ADA	1	1	

		ADA	2	2	
		- Peraturan Desa tentang APBDesa			Lampirkan <i>fotocopy</i> dokumen
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		- Kerjasama Desa:			Lampirkan <i>fotocopy</i> dokumen
		1) Kerjasama antar Desa			
		Tidak ada	1	1	
		Ada	2	2	
		2) Kerjasama dengan pihak ketiga			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		- Pembentukan BUMDesa:			Lampirkan <i>fotocopy</i> dokumen
		1) Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		2) Penyertaan modal BUMDesa			
		TIDAK ADA	1	1	

		ADA	2	2	
		3) AD/ART			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		4) Rapat pertanggungjawaban			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		5) Aturan terkait dengan kepailitan			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		6) Struktur organisasi BUMDesa	1	1	
		Tidak Ada	2	2	
		ADA			
		- Aset desa:			Lampirkan <i>fotocopy</i> dokumen
		1) Inventarisasi			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		2) Penambahan			
		TIDAK ADA	1	1	

		ADA	2	2	
		3) Pelepasan			
		TIDAK ADA	2	2	
		ADA	1	1	
2.	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Sarana dan Prasarana:			
		- Ruang kerja			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		- Operasional dan tunjangan			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		- Buku data keputusan			
		Tidak ada	1	1	Lampirkan <i>fotocopy</i>
		ada	2	2	dokumen
		- Buku data anggota			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		- Buku data kegiatan			
		TIDAK ADA	1	1	Lampirkan <i>fotocopy</i>
		ADA	2	2	dokumen

		- Buku sekretariat TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		- Mesin ketik/komputer TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		- Printer TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		- Peraturan Tata Tertib BPDDes TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	Lampirkan <i>fotocopy</i> dokumen
3.	Pemerintah Desa	a. Gedung kantor ADA, DI RUMAH PRIBADI ADA, SEWA ADA, MILIK DESA, SEMIPERMANEN ADA, MILIK DESA, PERMANEN	1 2 3 4	1 2 3 4	
		b. Gedung Pertemuan/Balai Desa TIDAK ADA ADA, SEWA ADA, MILIK DESA, SEMIPERMANEN ADA, MILIK DESA, PERMANEN	1 2 3 4	1 2 3 4	
		c. Perangkat Desa - Jumlah Kepala Urusan (Kaur)			

		2 Kaur	1	1	
		3 Kaur	2	2	
		- Jumlah Kepala Seksi (Kasi)	1	1	
		2 Kepala Seksi	2	2	
		3 Kepala Seksi	1	1	
		Tingkat pendidikan Kaur dan Kasi SLTA/ sederajat (kurang atau sama dengan 50%) SLTA ke atas (di atas 50%)	2	2	
		d. Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK)			
		Tidak Ada	1	1	
		ADA	2	2	
		e. Pengaturan Kewenangan			
		- Perdes Kewenangan asal usul			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		- Perdes Kewenangan lokal skala Desa			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		- Perdes Kewenangan yang ditugaskan			
		TIDAK ADA	1	1	
			2	2	

		ADA			
		- Apakah Batas Desa sudah ditetapkan BELUM DENGAN ORDINAT SUDAH DENGAN ORDINAT	1 4	1 4	
		- Luas wilayah BELUM DITENTUKAN SUDAH DITENTUKAN	1 4	1 4	Lampirkan Peta Wilayah Desa
		- Siltap Kades dan Perangkat (Nilai besarannya): DI BAWAH UPAH MINIMUM KABUPATEN DI ATAS UPAH MINIMUM KABUPATEN	1 4	1 4	
		- Berapa Perdes yg diterbitkan dalam 1 tahun 1-3 Lebih dari atau sama dengan 4	1 2	1 2	Lampirkan dokumennya
		- Berapa peraturan kepala desa yang diterbitkan dalam 1 tahun 1 Lebih dari atau sama dengan 2	1 2	1 2	
		- Berapa Peraturan bersama Kepala Desa yg diterbitkan dalam 1 tahun 1 2-3	1 3 4	1 3 4	

		Lebih dari 3			
		- Pernah tidaknya menjadi juara lomba desa dan tingkatannya			Isi di tingkatan yang paling akhir
		TIDAK PERNAH	1	1	
		PERNAH, TINGKAT KECAMATAN	2	2	
		PERNAH, TINGKAT KABUPATEN/KOTA	3	3	
		PERNAH, TINGKAT PROVINSI	4	4	
		PERNAH, TINGKAT REGIONAL/NASIONAL	5	5	
		- Pernah tidaknya menjadi <i>Lab site</i> dari Kementerian/Lembaga (K/L)			
		TIDAK PERNAH	1	1	
		PERNAH	2	2	
		- Berapa kali dalam setahun Desa menerima Bimbingan Teknis dari			Lampirkan bukti dokumentasi/keikutsertaannya
		1) Pemerintah Pusat			
		TIDAK PERNAH	1	1	
		PERNAH 1 KALI	2	2	
		PERNAH 2-4	3	3	
		PERNAH LEBIH DARI 4 KALI	4	4	
		2) Pemerintah Provinsi			
		TIDAK PERNAH	1	1	
		PERNAH 1 KALI	2	2	
		PERNAH 2-4	3	3	
		PERNAH LEBI DARI 4 KALI	4	4	

		3) Pemerintah Kabupaten/Kota TIDAK PERNAH PERNAH 1 KALI PERNAH 2-4 PERNAH LEBIH DARI 4 KALI			
		f. Jaringan Listrik TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	Sebutkan Jaringan Listrik Terbuat dari Apa?
		g. Sumber Daya Listrik (PLN) TIDAK STABIL STABIL	1 2	1 2	
		h. Sumber Daya Listrik (NON-PLN) TIDAK STABIL STABIL	1 2	1 2	
		i. Perpustakaan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	

4.	Administrasi Desa	a. Administrasi Umum b. Administrasi Kependudukan c. Administrasi Keuangan d. Administrasi Pembangunan e. Administrasi BPDes f. Administrasi Lainnya ADA 1 ADA 2 ADA 3 ADA 4 ADA 5 LENGKAP	 1 2 3 4 5 6	 1 2 3 4 5 6	Isilah sesuai kepemilikan administrasinya
5.	Keuangan Desa	a. Rasio Jumlah Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Dana Desa (DD) 50% ke bawah Di atas 50% b. Laporan Dana Desa (DD) TIDAK ADA ADA c. Alokasi Dana Desa (ADD) TIDAK ADA ADA d. Hibah/sumbangan pihak ketiga TIDAK ADA ADA	 1 4 1 2 1 2 1 2	 1 4 1 2 1 2	

	e. Bantuan Keuangan dari Kabupaten/Kota TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
	f. Bantuan Keuangan Provinsi TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	Lampirkan Sumbernya Asal
	g. Lain-lain pendapatan Desa yang Sah TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	Lampirkan Sumbernya Asal
	h. Rasio Penghasilan Tetap Aparatur Desa Terhadap Belanja Pembangunan 30% Ke Atas Kurang dari 30%	1 2	1 2	
	i. SiLPA - SiLPA total Sama Dengan atau Di atas 30% Kurang 30% - SiLPA Dana Desa Sama Dengan atau Di atas 30% Kurang 30%	1 4 1 4	1 4 1 4	
	j. Hasil kekayaan Desa yang dipisahkan	1	1	Sebutkan Sumbernya

		TIDAK ADA ADA	2 2	2 2	
		k. Penyertaan modal Desa TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	Sebutkan Sumbermya
6.	Akuntabilitas, Pembinaan, Dan Pengawasan	a. Laporan Kades kepada Pemerintahan atasan - Laporan penyaluran dan realisasi penggunaan Dana Desa TIDAK ADA ADA - Laporan pertanggungjawaban APBDesa TIDAK ADA ADA - Bentuk laporan pertanggungjawaban berupa Perdes TIDAK YA	1 2 1 2 1 2	1 2 1 2 1 2	

		b. Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		c. Penyampaian informasi kepada masyarakat (terkait materi secara umum). TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
HANYA DIISI OLEH KELURAHAN					
1.	Sarana Prasarana	a. Gedung kantor ADA, DI RUMAH PRIBADI ADA, SEWA ADA, MILIK PEMDA, SEMIPERMANEN ADA, MILIK PEMDA, PERMANEN	1 2 3 4	1 2 3 4	
		b. Gedung Pertemuan TIDAK ADA ADA, MILIK PEMDA, SEMIPERMANEN ADA, MILIK PEMDA, PERMANEN	1 2 3	1 2 3	
		c. Perangkat Kelurahan 50% BUKAN PNS DI ATAS 50% PNS	1 2	1 2	
		d. Mesin tik/ komputer TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		e. Kendaraan dinas lurah			

		TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		f. Struktur Organisasi TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		g. Jaringan Listrik TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	Sebutkan Sumber Daya Listrik Terbuat dari apa?
		h. Sumber Daya Listrik (PLN) TIDAK STABIL STABIL	1 2	1 2	
		i. Sumber Daya Listrik (NON-PLN) TIDAK STABIL STABIL	1 2	1 2	
		j. Perpustakaan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
3.	Akuntabilitas	Kotak Pengaduan Masyarakat TIDAK ADA ADA TAPI TIDAK DIMANFAATKAN ADA DAN DIMANFAATKAN	1 2 3	1 2 3	
4.	Administrasi	a. Laporan Kinerja Tahunan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		b. Laporan Tahunan Lurah			

		TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
	c. Papan Informasi Pelayanan	TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
	d. Loket Pelayanan	TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
	e. Buku Registrasi Pelayanan	TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
	f. Buku Profil Kelurahan	TIDAK ADA ADA	1 4	1 4	
	g. Buku Administrasi Umum	TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
	h. Buku Administrasi Kependudukan	TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
	i. Buku Administrasi Keuangan	TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
	j. Buku Administrasi Pembangunan		1	1	

		TIDAK ADA ADA	2 2	2 2	
		k. Buku Administrasi Lainnya TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		l. Kartu Uraian Tugas TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		m. Peta Wilayah Kelurahan TIDAK ADA ADA	1 4	1 4	
		n. Peta Batas Kelurahan TIDAK ADA ADA	1 4	1 4	
II. KINERJA					
1.	Kinerja	a. Strategi dalam pemberdayaan masyarakat - Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat (P3MD) (Khusus diisi oleh Desa) TIDAK ADA ADA - Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat 2 tahun terakhir	1 2 1 2 1	1 2 1 2 1	Lampirkan dokumennya

		<p>TIDAK ADA</p> <p>ADA</p> <p>- Fasilitasi dalam pemasaran produk unggulan dari masyarakat</p> <p>TIDAK ADA</p> <p>ADA</p>	2	2	
		<p>b. Kebijakan dalam pemberdayaan masyarakat</p> <p>Ada tidaknya regulasi dalam pemberdayaan masyarakat</p> <p>TIDAK ADA</p> <p>ADA</p>	1 2	1 2	Lampirkan dokumennya
		<p>c. Pembinaan Kemasyarakatan</p> <p>- melakukan forum-forum kebersamaan seperti gotong royong 2 tahun terakhir</p> <p>TIDAK ADA</p> <p>ADA</p> <p>- <i>Reward</i> bagi perangkat dan kelompok masyarakat</p> <p>TIDAK ADA</p> <p>ADA</p>	1 2	1 2	
		<p>d. Budaya Kerja</p> <p>- apakah telah mendata kehadiran</p>			

		pegawai secara rutin TIDAK YA - apakah telah memiliki standar jam pelayanan TIDAK YA - apakah sudah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan masyarakat BELUM ADA ADA	1 2 1 2 1 2	1 2 1 2	
III. INISIATIF DAN KREATIVITAS DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
1.	Inisiatif dan kreativitas	a. Visi dan misi pemberdayaan masyarakat TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	Lampirkan dokumennya
		b. Kebijakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat: TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		c. Eksistensi institusi pemberdayaan masyarakat dan aparatur TIDAK ADA	1 2	1 2	

		ADA			
		d. Alokasi anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat dan aparatur desa (khusus diisi oleh desa)			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		e. Kebijakan pemerintah desa dalam pengentasan kemiskinan di pedesaan (khusus diisi oleh desa)			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		f. Alokasi anggaran untuk program pengentasan kemiskinan (khusus diisi oleh desa)			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
IV. DESA DAN KELURAHAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI/ <i>E-GOVERNMENT</i>					
1.	Ketersediaan sistem teknologi informasi berbasis internet	a. Jaringan Internet			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		b. Website Desa			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
2.	Perangkat komputer	a. <i>Software</i> Dengan Spesifikasi Minimal Untuk Operasi Jaringan Internet			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	

		b. <i>Hardware</i> Dengan Spesifikasi Minimal Untuk Operasi Jaringan Internet			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
4.	Administrasi	a. Administrasi Berbasis Teknologi Informasi			
		- Administrasi umum	1	1	
		TIDAK ADA	2	2	
		ADA	1	1	
		- Administrasi kependudukan	2	2	
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		- Administrasi keuangan	1	1	
		TIDAK ADA	2	2	
		ADA	1	1	
		- Administrasi BPD (Khusus diisi oleh Desa)	2	2	
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		- Administrasi pembangunan			
		TIDAK ADA			
		ADA			
		- Administrasi lainnya			

		TIDAK ADA ADA			
		b. Perangkat yang mengelola Teknologi Informasi TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		c. Tersedia tokoh pemuda teknopreneur di tingkat RT/RW TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		d. Perpustakaan <i>online</i> TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		e. Internet gratis/ <i>HotSpot</i> TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
V. PELESTARIAN ADAT DAN BUDAYA					
1.	Pelestarian Adat dan Budaya	a. Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Adat dan Budaya TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		b. Keterlibatan Kelembagaan Adat dalam Pelestarian Adat dan Budaya TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		c. Pembinaan Seni Budaya Setempat TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	Oleh Siapa, sebutkan

		d. Kebijakan Menjaga kelestarian adat TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	Oleh Siapa, sebutkan
		e. Alokasi Anggaran Pelestarian Adat TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	Oleh Siapa, sebutkan

B. BIDANG KEWILAYAHAN

N O.	IDENTITAS/KONDISI		KETERANGAN
1	2		3
i. IDENTITAS DESA DAN KELURAHAN			
1.	Nama	:	
2.	Kode	:	
3.	Tipologi (LINGKARI YANG SESUAI)	:	Pantai/Dataran Rendah/Pegunungan/Pertanian
4.	Orbitasi Wilayah ke	:	1. Lebih dari 6 jam

	Kabupaten/Kota (LINGKARI YANG SESUAI)		2. 5-6 jam
			3. 3-4 jam
			4. 1-2 jam
			5. Kurang dari 1 jam
5.	Kondisi Wilayah	:	1. Ada di Ibukota kecamatan/di luar Ibukota kecamatan
			2. Rawan Bencana/Tidak
ii. BATAS			
1.	Batas Desa	:	Tidak Ada Ada
2.	Penetapan batas dengan ordinat	:	TIDAK ADA ADA
3.	Komposisi Umur		Tahun 1
			Tahun 2
	Kurang dari 15 Tahun	:	
	Lebih dari 15 tahun sampai dengan 56 tahun	:	
	Lebih dari 56 tahun	:	
4.	Jumlah penduduk menurut gender (BANYAK ORANG)		
	Jumlah penduduk total	:	
	Jumlah penduduk laki-laki	:	
	Jumlah penduduk perempuan	:	
	Jumlah kepala keluarga	:	

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1	TAHUN KE-2	

			(THN)	(THN)	
1	2	3	4	5	6
III. INOVASI					
1.	Embrio Aktivitas Inovasi	a. Adanya produk unggulan. TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		b. Adanya Peran pemerintah dalam mengelola produk unggulan. TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		c. Adanya keuntungan finansial untuk dari aktivitas ekonomi produktif. TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		d. Adanya keuntungan sosial dari aktivitas ekonomi produktif. TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		e. Adanya kegiatan kreatif yang membutuhkan teknologi. TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
2.	Kelembagaan Inovasi	a. Adanya pelembagaan aktivitas inovasi masyarakat (mis. UMKM, koperasi, <i>cluster</i>). TIDAK ADA	1	1	

		ADA	2	2	
		b. Adanya peta rencana (<i>roadmap</i> inovasi) secara berkelanjutan dalam mengembangkan produk unggulan desa			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
3.	Jejaring Inovasi	a. Interkoneksi yang terbangun dalam pengelolaan produk inovasi masyarakat (mis. adanya divisi kerjasama dalam manajemen UMKM/BUMDes).			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		b. Kesepahaman dan kerjasama dengan pemerintahan sekitar dalam pengelolaan potensi khususnya produk unggulan.			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		c. Dukungan pemerintahan supra (mis. kecamatan, kabupaten, provinsi, atau pusat) bagi pengembangan produk unggulan.			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		d. Jaringan pengembangan (mis. dukungan dunia pendidikan dan keterampilan) untuk peningkatan kualitas produk unggulan.			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	

		e. Jejaring Kerjasama dengan pihak ketiga dalam pemasaran produk inovasi. TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
4.	Budaya Masyarakat Inovasi	a. Teknologi tepat guna yang ditemukan masyarakat 2 tahun terakhir. TIDAK ADA ADA	1 4	1 4	Lampirkan semua bukti
		b. Pemanfaatan teknologi tepat guna. TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		c. Lembaga penyedia teknologi. TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		d. Aktivitas masyarakat dalam pengembangan produk. TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		e. Upaya pelestarian pengembangan produk. TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
5.	Keterpaduan Perencanaan Inovasi	a. Adanya integrasi antara peta rencana (<i>roadmap</i>) inovasi dengan perencanaan pembangunan tahunan dan lima tahunan (Mis. Rencana Pembangunan Jangka Pendek dan Menengah).			

		TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		b. Adanya sinergi pengembangan inovasi dengan kerangka Sistem Inovasi Daerah (SIDa). TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
6.	Kepekaan Masyarakat terhadap Dinamika Global/Ekonomi	a. Penemuan inovasi yang ramah lingkungan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	Lampirkan Bukti Lengkap
		b. Kemampuan penyesuaian produk inovasi terhadap dinamika tuntutan konsumen/pasar TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		c. Adanya rencana pengembangan produk inovasi di dalam maupun di luar desa dan kelurahan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		d. Adanya sinergi berbagai lembaga dalam pembangunan inovatif (<i>Heksagonal</i>) TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
7.	Faktor-faktor Kunci dalam Pengelolaan	a. Spesialisasi Produk Unggulan TIDAK ADA	1	1	Sebutkan produk

	Potensi secara Inovatif	ADA	2	2	unggulannya dan lembaga/unsur yang terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan potensi
		b. Dukungan Penelitian dan Pengembangan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		c. Pengembangan Sumber Daya Manusia ataupun dari Supranya TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		d. Ketersediaan dan Akses Bahan Baku dari dalam desa dan kelurahan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		e. Ketersediaan Sumberdaya Modal dari pemerintah Desa dan Kelurahan atau pihak ketiga TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		f. Pelatihan Kewirausahaan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		g. Adanya Kepemimpinan dan Visi Bersama dalam mengembangkan dan mengelola potensi Desa dan Kelurahan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
IV. TANGGAP DAN SIAGA BENCANA					
1.	Perencanaan Kontingensi	Adanya musyawarah perencanaan identifikasi bencana			

		TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
2.	Peta Risiko bencana	a. Ketersediaan peta bencana beserta rambu-rambunya TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		b. Sosialisasi mengenai peta bencana pada masyarakat dalam waktu 2 tahun terakhir ini TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
3.	Sistem Peringatan Dini Terpusat Pada Masyarakat	a. Pengetahuan dan simulasi dalam menghadapi Risiko 2 tahun terakhir TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		b. Sistem Pemantauan yang dikembangkan pemerintah Desa dan Kelurahan dalam menghadapi bencana TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		c. Layanan TIM penanganan bencana yang di bentuk Desa dan Kelurahan	1 2	1 2	

		TIDAK ADA ADA			
		d. Penyebarluasan dan Komunikasi tanggap bencana TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		e. Alat deteksi dini bencana TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
4.	Infrastruktur Evakuasi	a. Tempat Evakuasi TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		b. Jalur Evakuasi TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		c. Sarana Evakuasi TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
V. PENGATURAN INVESTASI					
1.	Investasi yang masuk ke Desa dan Kelurahan	a. Investasi yang masuk ke Desa dan Kelurahan dalam 2 tahun terakhir TIDAK ADA ADA	1	1	

			2	2	
		b. Apakah melibatkan BPD dan Pemerintah Desa dan Kelurahan TIDAK YA	1 2	1 2	
		c. Menyebabkan terjadinya pembebanan pada Desa dan Kelurahan TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
		d. Menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
		e. Mengurangi jumlah kepemilikan Tanah Desa/Tanah Kas Desa (Khusus Diisi Oleh Desa) TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	

c. BIDANG KEMASYARAKATAN

NO.	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
i. PARTISIPASI MASYARAKAT					
1.	Musyawarah Dusun	a. Partisipasi Masyarakat TIDAK ADA ADA	1 5	1 5	
		b. Rasio Laki-Laki Dan Perempuan TIDAK SEIMBANG SEIMBANG	1 3	1 3	
2.	Swadaya Masyarakat Untuk Pembangunan Sarana Prasarana Desa 2 Tahun Terakhir	Partisipasi Pendanaan Masyarakat TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
3.	Swakelola Masyarakat Untuk Pembangunan Sarana Prasarana Desa 2 Tahun Terakhir	Partisipasi Pengelolaan Pembangunan oleh Masyarakat TIDAK ADA TIM PENGELOLA KEGIATAN ADA TIM PENGELOLA KEGIATAN	1 2	1 2	

4.	Gotong Royong Penduduk Desa 2 Tahun Terakhir	Aktifitas GotongRoyong Penduduk TIDAK ADA ADA	1 4	1 4	
II. LEMBAGA KEMASYARAKATAN			II. LEMBAGA KEMASYARAKATAN		
1.	Organisasi Pemuda	Aktifitas Organisasi Pemuda TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
2.	Organisasi Profesi (petani, pedagang, nelayan, buruh, paguyuban, dll)	Aktifitas Organisasi Profesi TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
3.	Organisasi Olah Raga	Aktifitas Organisasi Olah Raga TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
4.	LPM atau Sebutan Lain	Aktifitas LPM TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
5.	Kelompok Gotong Royong	Aktifitas Kelompok Gotong Royong TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
6.	Karang Taruna	Aktifitas Karang Taruna TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
7.	Lembaga Adat, Budaya, Dan Kesenian	Aktifitas Lembaga Adat, Budaya, Dan Kesenian TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
8.	Kelompok Usaha	Aktifitas Kelompok Usaha TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
9.	Koperasi	Memiliki Koperasi TIDAK ADA ADA	1 4	1 4	

10.	Organisasi Perempuan	Aktifitas Organisasi Perempuan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
III. PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)					
1.	Lembaga PKK	Keberadaan PKK TIDAK ADA ADA	1 4	1 4	
2.	Program PKK	Realisasi 10 Program Pokok TEREALISASI 1 KEGIATAN TEREALISASI di atas 1 KEGIATAN	1 2	1 2	
3.	Organisasi PKK	Kelengkapan Kelompok Kerja TIDAK LENGKAP LENGKAP	1 2	1 2	
		Kelengkapan Kelompok Dasawisma TIDAK LENGKAP LENGKAP	1 2	1 2	
IV. KEAMANAN DAN KETERTIBAN					
1.	Pengamanan Lingkungan Manusia Dan	a. Kerja sama pelestarian lingkungan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		b. Kerja sama pemantauan limbah perusahaan yang ada di desa TIDAK ADA ADA	1	1	

			2	2	
		c. Kerja sama pendaur ulangan limbah TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		d. Petugas keamanan lingkungan (Linmas) TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		e. Pos kamling (Keamanan Lingkungan) TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
2.	Konflik SARA	a. Konflik antar kelompok TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
		b. Konflik antar suku TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
		c. Konflik berbaur agama/kepercayaan TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
		d. Konflik antar RAS TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	

3.	Perkelahian	Kasus perkelahian yang menimbulkan korban dalam 2 tahun terakhir TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
4.	Pencurian dan perampokan	a. Kasus pencurian/perampokan biasa TIDAK ADA ADA	2 1	2 1	
		b. Kasus pencurian/perampokan dengan kekerasan TIDAK ADA ADA	2 1	2 1	
5.	Perjudian	Jumlah kasus perjudian dengan berbagai modus TIDAK ADA ADA	2 1	2 1	
6.	Narkoba	a. Jumlah kasus narkoba dengan pelaku pemerintah desa TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
		b. Anggota Masyarakat yang Terkena Narkoba TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
7.	Prostitusi	Jumlah kasus prostitusi dengan berbagai modus TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
8.	Pembunuhan	a. Jumlah kasus pembunuhan TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
		b. Jumlah kasus pembunuhan yang korbannya penduduk desa setempat			

		TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
		c. Jumlah kasus pembunuhan yang pelakunya penduduk desa setempat TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
9.	Kekerasan Seksual	Jumlah kasus perkosaan TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
10.	Kekerasan dalam Keluarga	a. Kekerasan terhadap anak TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
		b. Kekerasan terhadap anggota keluarga lainnya TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
11.	Penculikan	Jumlah kasus penculikan TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
12.	HIV/AIDS	Kasus HIV/AIDS TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
v. PENDIDIKAN					
1.	Buta Huruf	Penduduk yang tidak bisa baca tulis TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
2.	Putus Sekolah	a. Jumlah Penduduk Tidak Tamat SD/ sederajat KURANG DARI 1%	4 1	4 1	

		LEBIH DARI 1%			
		b. Jumlah Penduduk Tidak Tamat SLTP/ sederajat KURANG DARI 1% LEBIH DARI 1%	4 1	4 1	
3.	Tamat Sekolah	a. Jumlah penduduk tamat SLTA/ sederajat KURANG DARI 1% LEBIH DARI 1%	1 4	1 4	
		b. Jumlah penduduk tamat D3/ Sarjana muda KURANG DARI 1% LEBIH DARI 1%	1 4	1 4	
		c. Jumlah penduduk tamat Sarjana/ S-1 KURANG DARI 1% LEBIH DARI 1%	1 4	1 4	
		d. Jumlah penduduk tamat Pasca Sarjana KURANG DARI 1% LEBIH DARI 1%	1 4	1 4	
VI. KESEHATAN					
1.	Kematian Bayi	Jumlah Kematian Bayi PENURUNAN KURANG DARI 10% DARI TAHUN	1	1	

		SEBELUMNYA PENURUNAN DI ATAS 10% DARI TAHUN SEBELUMNYA	4	4	
2.	Gizi dan Kematian Balita	a. Jumlah Balita Gizi Buruk PENURUNAN KURANG DARI 10% DARI TAHUN SEBELUMNYA PENURUNAN LEBIH DARI 10% DARI TAHUN SEBELUMNYA	1 2	1 2	
		b. Jumlah Balita Meninggal KURANG DARI 1% DI ATAS 1%	2 1	2 1	
3.	Posyandu	a. Keberadaan Posyandu TIDAK ADA ADA	1 4	1 4	
		b. Kelembagaan PRATAMA DI ATAS PRATAMA	1 4	1 4	
		a. Jumlah RT Pengguna Sumber Air Lainnya TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
5.	Kepemilikan Jamban Dalam Rumah Tangga (RT)	a. Total RT Mempunyai Jamban/WC sendiri MENURUN TETAP MENINGKAT	1 2 3	1 2 3	
		b. Total RT yang tidak memiliki jamban/WC sendiri MENURUN TETAP	3 2	3 2	

		MENINGKAT	1	1	
		c. Total RT pengguna MCK umum			
		MENURUN	1	1	
		TETAP	2	2	
		MENINGKAT	3	3	
		d. Total RT pengguna MCK di sungai/kali			
		MENURUN	3	3	
		TETAP	2	2	
		MENINGKAT	1	1	
		e. Total RT yang tidak mendapat air bersih			
		MENURUN	3	3	
		TETAP	2	2	
		MENINGKAT	1	1	
6.	Fasilitas Kesehatan Lingkungan	a. Puskesmas/Balai Pengobatan			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		b. Bidan/Mantri/Dokter			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		c. Jamban Keluarga/MCK			
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
VII. EKONOMI					
1.	Pengangguran	Jumlah penduduk usia 15-65 tahun yang tidak bekerja			
		KURANG DARI 10%	4	4	
		LEBIH DARI ATAU SAMA DENGAN 10%	1	1	

2.	Mata Pencaharian/Sumber Pendapatan (<i>Checklist</i> mayoritas penduduk yang mana dan lingkari khusus yang Pendapatan Perkapita)	Pertanian			
		Industri			
		Jasa			
3.	Kelembagaan Ekonomi	a. Pasar Tradisional TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		b. Toko/Kios TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		c. Pangkalan Ojek, Becak, Delman, Dan Sejenisnya TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
VIII. PENANGGULANGAN KEMISKINAN					
1.	Data Masyarakat Miskin	Data Masyarakat Miskin TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
2.	Program Penanggulangan Kemiskinan	Program Penanggulangan Kemiskinan TIDAK ADA ADA	1 3	1 3	
IX. PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT					
1.	Analisis Kebutuhan	a. Penyusunan Analisis Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Masyarakat TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	

		b. Banyaknya Kegiatan Dalam Peningkatan Kapasitas Masyarakat 1-3 LEBIH DARI 3	1 2	1 2	
2.	Pelaksanaan Program	Jumlah Jenis program Peningkatan Kapasitas Masyarakat 1-3 Lebih dari 3	1 2	1 2	

CARA PENENTUAN TINGKAT PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN

Menghitung poin total dari subindikator masing-masing desa dan kelurahan kemudian rujuk pada nilai ideal yang ditentukan pada kolom 3 kategori di bawah.

Mengklasifikasikan poin Desa ke dalam kategori sebagai berikut:

N O	POIN	KATEGORI
1	2	3
1	≤ 300	Kurang Berkembang
2	301 – 450	Berkembang
3	≥ 451	Cepat Berkembang

Mengklasifikasikan poin Kelurahan ke dalam kategori sebagai berikut:

N	POIN	KATEGORI
---	------	----------

0		
1	2	3
1	≤ 200	Kurang Berkembang
2	201 – 350	Berkembang
3	≥ 351	Cepat Berkembang

MENTERI DALAM NEGERI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

W. SIGIT PUDJIANTO
NIP. 19590203 198903 1 001.

REPUBLIK INDONESIA,
ttd

TJAHJO KUMOLO